BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Lahan Gambut
Edisi : 8 April 2008
Hari : Selasa
Hal. : 13

Moratorium untuk Membuka Gambut
Regulasi Tersedia, Pengawasan Masih Lemah

Jakarta, Kompas - Greenpeace Asia Tenggara mendesakkan dilakukan moratorium pembukaan lahan gambut yang mengemisi karbon cukup besar. Dari hasil investigasi Greenpeace Asia Tenggara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, di sana masih terjadi pembukaan lahan gambut mengatasnamakan kebun kelapa sawit.Seruan untuk moratorium gambut juga datang dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat lain. "Kami tidak antikelapa sawit. Akan tetapi, kami akan terus menentang pengeringan lahan gambut dan perusakan hutan," kata Political Advisor Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia Arief Wicaksono dalam peluncuran laporan "Menggoreng Iklim" di Jakarta, Senin (7/4).

Faktanya, seperti dikatakan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Hapsoro, proses pembukaan hutan gambut untuk kebun kelapa sawit salah satu perusahaan besar mengabaikan aspek-aspek pelestarian lingkungan. Penebangan hutan dilakukan sebelum rangkaian proses perizinan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), selesai dilakukan. Puluhan hektar hutan gambut kini sudah dan sedang dibuka.

Dua kali kunjungan tim investigasi ke lokasi hutan gambut menunjukkan kanal-kanal sudah dibuat untuk mengeringkan lahan gambut. Pengeringan tersebut, menurut warga yang menggantungkan hidupnya dari udang dan ikan, menyebabkan produksi udang dan ikan turun drastis.

"Moratorium pengeringan gambut sangat diperlukan untuk menghindari dampak lebih besar," kata Hapsoro.

Pemerintah mendua

Menurut Greenpeace, pembukaan lahan gambut yang masih terjadi saat ini menunjukkan sikap pemerintah yang mendua. Di satu sisi mendukung pembukaan kebun ramah lingkungan, di sisi lain mendorong investasi besar membuka hutan gambut.Fakta itu dinilai menunjukkan ketidaktegasan pemerintah bila sudah menyangkut investasi.

Data tahun 2007, luas lahan gambut Indonesia 200.728 kilometer persegi—hampir setengah luas gambut tropika dunia. Serapan karbon diperkirakan sekitar 17 teragram per tahun.

Dari data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, lahan gambut terluas di Indonesia adalah di Papua (8,9 juta ha), Sumatera (7,2 juta ha), Kalimantan (4,4 juta ha), Maluku (48.000 ha), dan Sulawesi (44.000 ha). "Potensi gambut luar biasa, baik kemampuan menyerap karbon maupun melepasnya," kata Arief.

"Riau hanya salah satu contoh. Hal sama terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Lagi-lagi karena kelapa sawit," kata Hapsoro. Apa yang terjadi di Riau adalah contoh buruk pengawasan pemerintah pada pengelolaan lahan gambut.

Sejumlah ketentuan melindungi lahan gambut sudah dikeluarkan, termasuk Keputusan Presiden No 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Surat Edaran Menteri Pertanian agar pemerintah daerah tak mengeluarkan izin membuka kebun di atas lahan gambut. Namun, kondisi di lapangan ternyata tak terkendali. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup